



**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI (*EARLY
WARNING SYSTEM*) BENCANA DI KOTA MALANG**

(Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang)

Oleh :

- 1. Aditya Nugrahaning Putri (201310050311072)**
- 2. Puji Setyawan (201410050311092)**
- 3. Rendika Satria Wicaksono Putra (201410050311121)**
- 4. Istayu Pratistaning Utami (201410050311129)**
- 5. M. Agum Bikhransyah (201410050311152)**
- 6. Mukhtaruddin (201410050311162)**
- 7. Shella Febrian Saputri (201410050311182)**

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan dampak psikologis (UU NO.24 TAHUN 2007). Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*) Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana kapasitas yang rendah dari berbagai komponen didalam masyarakat. (bnpb.go.id)

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, baik terhadap bencana alam, maupun bencana akibat ulah manusia. Rangkaian berbagai bencana di Malang seperti banjir, tanah longsor, dll. Berdasarkan peta potensi bencana BPBD, setiap kecamatan memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Kejadian bencana selalu menimbulkan krisis kesehatan, maka dalam penanganannya perlu diatur dalam suatu kebijakan. Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan bahwa Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPP), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah harus menyusun langkah-langkah penanggulangan bencana. Upaya-upaya penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dimulaidari langkah-langkah penanggulangan sebelum bencana, saat bencana, sampai pasca bencana.

Badan penanggulangan bencana Daerah adalah perangkat yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Malang. Untuk dapat melindungi masyarakat Kota Malang dari berbagai resiko bencana tentu harus ada langkah-langkah tepat yang harus dilakukan, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi telah memberikan kemudahan dalam menjawab tantangan-tantangan pada penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. Bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah dengan membangun sistem peringatan dini yang terkait dengan bencana hidrometeorologi yang berhubungan dengan cuaca dan iklim.

Peringatan dini merupakan faktor utama dalam pengurangan risiko bencana. Peringatan dini dapat mencegah korban jiwa dan mengurangi dampak ekonomi dan material dari sebuah bencana. (<http://bencanapedia.id>)

Sistem peringatan dini bencana adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan secara efektif maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko, memfasilitasi kegiatan-kegiatan penyadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyampaian peringatan yang terpercaya. Peringatan dini mencakup serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya serta berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Syarat sebuah peringatan dini yang lengkap dan efektif serta berpusat pada masyarakat (*people-centered*) adalah terpenuhinya empat unsur yakni pengetahuan risiko, pemantauan bahaya dan layanan peringatan, penyebaran, dan komunikasi serta kemampuan respon. Tujuan utama sistem peringatan dini berbasis masyarakat adalah peningkatan kapasitas individu dan masyarakat yang

terancam bahaya untuk bertindak secara tepat waktu dan benar sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan fisik maupun non fisik, bahkan kematian.

Sistem peringatan dini inipun dapat dibangun manakala semua unsur, mulai dari masyarakat, aparat di daerah sampai kepada pada pengambil kebijakan pada organisasi penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah sepakat dan satu persepsi tentang pengertian bencana dan penanggulangannya. Lain dari itu, pendefinisian akan faktor-faktor penyebab dan jenis/klasifikasi bencana juga telah disepakati sebagai suatu acuan dalam upaya penanggulangan bencana dimaksud.

Untuk tindakan penanggulangan bencana, diperlukan data yang akurat tentang kejadian bencana itu sendiri. Diantara data yang diperlukan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Lokasi bencana (where), hal ini perlu diketahui sebagai dasar untuk perencanaan pelaksanaan penanggulangan bencana; hal tersebut dikarenakan bencana yang terjadi di perkotaan akan jauh berbeda kerugian atau kehilangan jiwa maupun hartanya dibanding dengan bencana yang terjadi di pedesaan.
- b) Penyebab bencana (why), hal ini dapat didapatkan melalui analisis lapangan.
- c) Waktu kejadian bencana (when), walaupun waktu kejadian yang tepat mungkin sulit diramal, namun dapat diperkirakan berdasarkan pada data historis, data seri dan data hasil pemantauan; perkiraan dapat juga didasarkan pada perubahan gejala alam dan perilaku makhluk hidup (binatang) seperti misalnya binatang yang biasanya tinggal di hutan akan berlari menuju permukiman
- d) Bagaimana kejadian dari bencana (how), proses kejadian dan kronologi harus diketahui untuk dijadikan pembelajaran ke depannya.

Dari data yang diperoleh tersebut di atas, dihimpun dan selanjutnya dianalisis serta diteliti apakah peringatan dini terhadap suatu kejadian bencana itu dapat dilakukan atau tidak. Sebab sistem peringatan dini (*early warning system*) ini dapat dilakukan tergantung pada jenis bencana dan data yang tersedia. Bila data

pemantauan cukup akurat, maka peringatan dini dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila terjadi fenomena alam yang melebihi normal cenderung meningkat, maka peringatan dini dapat dilakukan. Namun sesungguhnya yang perlu dicatat adalah, bahwa tidak semua jenis bencana dapat dilakukan peringatan dini.

Hal lain disamping adanya peringatan dini terhadap bencana yang mungkin terjadi dan akan menimpa kehidupan masyarakat, perlu juga dibuat simulasi-simulasi dari berbagai kemungkinan kejadian bencana, baik itu bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tentu pada daerah-daerah rawan bencana.

Selanjutnya hal itu perlu disosialisasikan dan atau dikampanyekan kepada masyarakat melalui organisasi penanggulangan bencana yang berwenang, seperti BPBD, SATKORLAK PBP (Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Pengungsian), maupun Pemerintah Daerah setempat. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat paham akan bencana yang mungkin akan terjadi di daerahnya, serta mengerti akan langkah-langkah penanggulangan bencana tersebut jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

Untuk mendapatkan data daerah rawan bencana seperti dimaksud di atas, maka tentu sebelumnya perlu dilakukan survei dan pemetaan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Saat ini dengan berbagai macam teknologi yang ada, kiranya hal itu dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka meningkatkan pengkajian daerah rawan bahaya maupun mitigasinya.

Aplikasi teknologi Penginderaan Jauh (*Remote Sensing*), GIS (*Geographic Information System*), dan GPS (*Global Positioning System*) yang terintegrasi dalam upaya pengkajian daerah rawan bencana alam dan mitigasi adalah salah satu jawaban dan upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisasikan kerugian dan korban akibat bencana.

Dari aplikasi teknologi di atas, bisa didapatkan berbagai macam data tentang daerah rawan bencana alam, seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor, gerakan tanah/gereakan massa batuan, banjir, gelombang pasang/trsunami, kebakaran hutan. Selain itu, dapat juga disusun database atau basisdata dari bencana alam, baik pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Dalam upaya penyusunan sistem informasi bencana alam, tentunya diperlukan penyebaran

basisdata bencana alam dan integrasi metadata bencana alam secara baik dan sistematis.

Kota Malang berpotensi bencana banjir dan longsor tercatat pada tahun 2017, kota Malang dilanda 22 bencana. Disamping itu Kota Malang juga sudah menerapkan sistem Aplikasi Teknologi Penginderaan Jauh (Remote Sensing), GIS (Geographic Information System) yang terintegrasi dalam upaya pengkajian daerah rawan bencana alam dan mitigasi yang salah satunya menjadi jawaban upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir kerugian dan korban akibat bencana.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas sistem peringatan dini bencana Kota Malang ?
2. Bagaimana efektivitas sistem peringatan dini bencana di kota Malang ?

C. Tujuan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan kegiatan magang ini yakni sebagai berikut:

- a. Mengetahui efektivitas sistem peringatan dini bencana di Kota Malang.
- b. Mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas sistem peringatan dini Bencana kota Malang.

BAB II

2.1 PROFIL INSTANSI

PEMBENTUKAN BPBD KOTA MALANG

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diundangkan pada tanggal 26 April 2007 khususnya pada Pasal 18 telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun di Kota Malang proses pembentukan BPBD baru dimulai pada tahun 2014 dengan penyusunan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Peraturan Daerah ini kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 44 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah yang diundangkan pada tanggal 6 Nopember 2014. Kemudian pengisian personil dalam struktur BPBD dilakukan pada tanggal 6 Januari 2015. Sebelum terbentuknya BPBD untuk urusan penanggulangan bencana di Kota Malang dilaksanakan oleh Bidang Penanggulangan Bencana yang berada dibawah struktur Badan Keselamatan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dimana operasional penanggulangan bencana dikendalikan oleh Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB).

A. SRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BPBD

BPBD kota Malang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. BPBD Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana. Adapun rincian tugas BPBD Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, BPBD Kota Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- h. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kota Malang terdiri dari:

1. Kepala BPBD

Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Malang. Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Unsur Pengarah terdiri dari sembilan orang yang berasal dari:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang;
- b. Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kota Malang, sejumlah 4 (empat) orang.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari. Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat membawahi Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum. Sekretariat melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan serta kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- c. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- f. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- g. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- h. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);

- j. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- k. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- l. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- m. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- n. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. pengelolaan anggaran;
- r. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- t. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- x. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan bencana;
- aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- bb. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Seksi Pencegahan Bencana dan Seksi Kesiapsiagaan Bencana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana dan Seksi Logistik Penanggulangan Bencana. Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Seksi Rehabilitasi Pascabencana dan Seksi Rekonstruksi Pascabencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.



2.2 AKTIVITAS MAGANG RISET

Nama : SHELLA FEBRIAN SAPUTRI

NIM : 201410050311182

Dalam pelaksanaan magang riset, terdapat beberapa kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan tersebut terdiri dari beberapa macam yakni kegiatan yang

berdasarkan komando dari bidang yang saya tempati di BPBD Kota Malang, kegiatan yang berasal dari seluruh bidang dan kesekretariatan, serta kegiatan wawancara sebagai upaya mendapatkan data. Dalam hal ini, jika terdapat waktu senggang di mana belum ada agenda dalam kantor tersebut, maka kami mengadakan kegiatan pembahasan data riset bersama anggota kelompok, serta mencari referensi dari internet atau buku.

Kegiatan yang berasal dari seluruh pihak BPBD seringkali melibatkan instansi lain. Kegiatan tersebut antara lain pertama, rapat dengan semua pihak BPBD dan lembaga surveyor terkait Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BPBD Kota Malang, kedua, sosialisasi dari inspektorat terkait analisis jabatan.

Kegiatan yang berasal dari bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu pertama, lomba Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur yang dihadiri beberapa OPD se-Jawa Timur. Dalam hal ini, saya diminta untuk menjaga daftar hadir peserta dan memberikan konsumsi. Setelah itu, input data jumlah peserta dan dokumentasi sebagai surat pertanggungjawaban kegiatan. Kendala kegiatan tersebut adalah Kurang mengetahui konsep acara karena hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan yang bersifat kondisional sehingga kurang memahami apa yang harus dipersiapkan ke depannya.

Kedua adalah Survey lapangan yakni pencatatan koordinat titik kumpul yang nantinya digunakan sebagai data kajian pembuatan peta jalur evakuasi. Setelah itu saya diminta untuk mapping peta Kelurahan Bareng yang terdiri dari peta wilayah dan peta rawan bencana. Kegiatan tersebut sedikit dapat diatasi karena telah mendapat bekal selama mata kuliah geographic Information System. Namun kegiatan ini terkendala laptop yang kurang memadai. Aplikasi Geographic Information System tersebut mempunyai kapasitas yang cukup besar sehingga sulit diinstal ke dalam laptop dan jika telah berhasil menginstalnya pun seringkali terhapus karena antivirus yang aktif sehingga harus melakukan install ulang yang membutuhkan waktu cukup lama.

Ketiga adalah Rapat kegiatan sapu bersih kali dengan relawan Kelurahan Tangguh Bandungrejosari, setelah itu mengikuti kegiatan sapu bersih kali di Kelurahan Bandungrejosari. Keempat adalah distribusi surat permohonan

partisipasi masker ke pimpinan perusahaan seperti mall-mall dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Masker tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat Kota Malang terkait erupsi Gunung Agung. Dalam hal ini, terdapat kendala yakni Satpam mall seringkali bingung dalam menanggapi kedatangan surat tersebut sehingga seringkali terdapat miscommunication. Misalnya satpam tidak mengetahui prosedur penerimaan surat sehingga kami dilemparkan dari orang satu ke orang lainnya dengan alasan orang tersebut tidak berwenang dalam menerima surat. Receptionist mall yang satu dengan yang lainnya berbeda, mall satu menggunakan satpam sebagai receptionist, mall lain menggunakan pusat informasi, sedangkan orang yang kami tanya seringkali tidak mengerti.

Kelima, Menyiapkan dan mendistribusikan undangan rapat pembahasan laporan penyusunan kajian pengurangan resiko bencana (PRB) BPBD Kota Malang yang akan dihadiri oleh Kepala bidang, Kepala sub bagian yang ada di BPBD, serta perwakilan LPPM Universitas Brawijaya. Selanjutnya saya juga mengikuti rapat tersebut. Keenam yakni Membuat proposal pengurangan resiko bencana Kota Malang.

Ketujuh, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yakni kegiatan pelatihan di tempat terbuka semacam coban. Tempat yang dipilih adalah Lembah Dieng. Sebelum kegiatan tersebut, saya diminta untuk membantu Persiapannya berupa packaging seragam dan kelengkapannya, distribusi undangan, serta rapat bersama relawan Kelurahan Tangguh untuk membahas pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tersebut sekaligus pengambilan seragam dan kelengkapannya. Dalam hal ini, terdapat kendala yakni pembagian job desk yang kurang teratur, di mana penanggungjawab telah dijelaskan di awal yakni penanggungjawan packaging, penanggungjawab mengecek data kesesuaian SK Kelurahan tentang anggota relawan Kelurahan Tangguh dan peserta yang hadir, penanggungjawab melayani peserta yang harus mengisi daftar hadir, dan lain-lain, namun seringkali penanggungjawab tersebut berpindah-pindah atau tertukar antara orang satu ke orang lainnya sehingga menimbulkan kebingungan, kendala lain yakni kurangnya koordinasi dan kurangnya komunikasi.

Terakhir yakni kegiatan apel siaga. Apel siaga tersebut diadakan pada tanggal 22 November 2017. Walaupun kegiatan tersebut masih lama terlaksana, namun persiapan harus dilakukan sejak beberapa bulan sebelumnya. Dalam hal ini, saya diminta untuk Membuat daftar absensi untuk kegiatan apel siaga yang akan dilaksanakan pertengahan bulan Oktober. Absensi tersebut terdiri dari beberapa poin, mulai dari kegiatan gladi bersih, hari H, dll. yakni terdiri dari 1000,750, 250, 268, dan 50 jumlah peserta. Apel siaga tersebut dihadiri oleh beberapa OPD se-Kota Malang, komunitas atau organisasi di Kota Malang, serta relawan Kelurahan Tangguh. Peserta tersebut akan diberi kaos yang dikenakan pada apel siaga tanggal 22 November 2017. Dalam hal ini, saya membantu melakukan packaging dan distribusi kaos, serta distribusi undangan apel siaga. Dalam acara apel siaga tersebut, masa magang saya telah selesai namun diminta untuk membantu distribusi kaos dan undangan, serta membantu pelaksanaan apel siaga yakni menjaga daftar hadir peserta dan memberikan konsumsi.

Aditya Nugrahaning Putri

201310050311072

Magang & Riset di Badan Penanggulangan Bencana Kota Malang dimulai pada Selasa, 5 September 2017 hingga 5 November 2017, dimana kita mengusung tema laporan magang riset tentang EWS (Early Warning System), tepatnya dengan Judul “**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI (EARLY WARNING SYSTEM) BENCANA DI KOTA MALANG.** selama 2

bulan kedepan kita melaksanakan magang riset untuk dapat menyelesaikan Laporan sesuai judul yang kita angkat dalam Proposal yang telah kita ajukan sebelumnya. Selain untuk menyelesaikan Laporan sebagai kewajiban tugas akhir magang, dalam proses magang selama 2 bulan kedepan kita berusaha untuk mampu menggali informasi apapun untuk menambah pengetahuan secara praktik di dunia kerja dan mengkomparasikan dengan teori yang telah kita dapat selama di bangku kuliah. Adapun jadwal kerja yang berlaku dalam instansi BPBD Kota Malang sebagai berikut :

Senin-Kamis : 08.00 – 16.00 WIB

Jum'at : 07.30 – 15.00 EIB

Hari pertama kita mulai melaksanakan magang disambut baik oleh pihak BPBD, pembagian awal adalah 2 orang di bagian sekretariat dan selebihnya di masing bidang yang ada di BPBD. Seiring dengan situasi dan kondisi di kantor saat itu bidang 1 yaitu bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan lebih membutuhkan tenaga terkait adanya Lomba Kelurahan tangguh tingkat Provinsi, untuk itu kita semua diperbantukan di bidang PK. Di hari pertama magang tersebut kita mengikuti serta membantu proses persiapan lomba Kelurahan tangguh semampu dan sebaik yang kita bisa, mulai dari hal kecil sekalipun namun disitu ketika kita mampu mengamati, kita mendapat pengalaman dan pengetahuan baru, sebagai contoh ketika kita membantu persiapan surat undangan, disitu kita tau pihak-pihak ataupun instansi terkait yang turut diundang dalam acara Lomba kelurahan tangguh, dan bahkan kita tau betapa pentingnya Tanda tangan para tamu undangan yang ternyata sangat penting untuk sebuah Surat Pertanggung Jawaban, hal yang sebelumnya tidak pernah kita tau dalam dunia kerja instansi pemerintahan. Kemudian setelah Acara lomba Kelurahan Tangguh yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Sawojajar telah selesai dilaksanakan, kita berkesempatan membantu untuk input Data para relawan 5 kelurahan Tangguh, beberapa tulisan yang kurang jelas membuat kebingungan saat input data, disitu sebuah pengetahuan baru lagi yang kita dapatkan, bahwa setiap Kelurahan Tangguh memiliki 15 Relawan Kelurahan Tangguh sedikit demi sedikit mulai paham, dimana Kelurahan Tangguh ini dibentuk dengan tujuan agar warga masyarakat dapat secara mandiri memahami Potensi resiko Bencana di daerahnya sendiri, secara mandiri memiliki kemampuan beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, mampu memulihkan diri sendiri manakala tertimpa bencana. Komunikasi terhadap pihak kantor terjalin begitu baik, dengan sering menjalin komunikasi kita banyak sekali mendapat pemahaman-pemahaman baru, terutama di bidang Kebencanaan, mulai mengerti apa itu mitigasi Bencana, rencana Kontijensi, Pengurangan Resiko Bencana, dan hal-hal lain terkait kebencanaan. Ketika Magang berkesempatan mengikuti rapat Analisis Jabatan, dimana sesuai yang pernah kita dapatkan di bangku kuliah terkait dengan mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan. Salah satu tugas yang sangat

berperan meningkatkan skill adalah pembuatan peta, masing-masing dari kita diberikan tugas Membuat Peta Rawan Bencana, Peta Wilayah, dan Peta Jalur Evakuasi. Walaupun mungkin tidak maksimal dengan hasilnya, namun dari prosesnya mampu mengembangkan skill kita yang awalnya tidak tau secara detail proses pembuatan peta akhirnya mulai mengerti, disini kita saling sharing dan membantu satu sama lain, selain itu bekal dari kampus yang pernah memberikan pelatihan pembuatan peta menggunakan aplikasi ARCGIS membuat kita tidak asing lagi dengan itu. Namun beberapa kendala adalah tidak semua laptop support, karna kapasitas aplikasi terlalu berat, untuk itu kita harus bergantian menggunakan laptop, akibatnya proses pengerjaannya pun tidak efisien. Selain itu kita juga biasanya membantu mengantar surat-surat Undangan jika ada sebuah acara, undangan tersebut biasanya ditujukan untuk OPD, Komunitas, kelurahan, maupun dunia Usaha, disini kita menjadi tau bahwa memang banyak pihak-pihak yang bekerjasama dengan BPBD dalam hal kebencanaan. Kita juga berkesempatan mengikuti acara “SABERKAL” Sapu Bersih Kali yang dilaksanakan di Bandungregosari, dimana hal ini adalah salah satu upaya pencegahan Bencana, karna di area Sungai yang penuh dengan sampah sangat rawan terhadap berbagai bencana, dalam kegiatan ini kita menjadi lebih kenal dengan para relawan, terutama Relawan Bandungregosari, merasakan bagaimana keakraban para Relawan yang notabene Malang adalah Kota yang memiliki Komunitas Relawan terbanyak.

Dengan mengenal beberapa relawan ini kita mampu bertukar informasi, terutama tentang Relawan Kelurahan Tangguh, tentang apa saja yang sudah mereka kerjakan, tentang kendala-kendala, dan apa pendapat mereka tentang BPBD, sekaligus menggali informasi tentang Peringatan Dini. Kita Juga berkesempatan mengikuti Pelatihan Relawan Tangguh di Lembah Dieng, sebelumnya pun kita mengikuti proses dari packing kaos hingga pembagian kaos untuk kegiatan Pelatihan tersebut, untuk Baju PDL, Hingga kaos apel siaga, pada pembagian Kaos memang sedikit terkendala karna beberapa data seperti ukuran dan daftar nama yang beberapa ada perubahan, maka dari itu kita harus lebih jeli check data yang sesuai dengan SK Kelurahan. Selama Magang Riset berlangsung memang sedang tidak banyak pekerjaan, namun di akhir Magang, dan ketika magang akan selesai hingga magang selesai, kantor sedang sibuk-sibuknya dengan project besar mereka yaitu APEL Siaga, setelah selesai magang kita sempat membantu pula pembagian kaos, dan juga distribusi Undangan, kurang persiapan, kurang koordinasi yang baik dan kurang tertatanya prosedur secara teknis pembagian Kaos yang begitu banyak membuat kurang efisiennya waktu, bahkan H-1 Apel Siaga pun beberapa Kaos dan Undangan belum terdistribusi.

Dengan adanya kegiatan Magang Riset ini menyadarkan bahwa sebagai mahasiswa kita harus memiliki pengetahuan yang komprehensif di segala bidang, pemahaman-pemahaman, pengetahuan baru ini benar dapat menjadi *The Most Valuable* sesuai dengan panduan Magang riset. Dengan adanya pelaksanaan

magang riset ini sebagai aplikasi proses belajar yang akhirnya dapat mengetahui bagaimana keadaan dunia Kerja saat ini, terutama dibidang pemerintahan dan pelayanan Publik,mengetahui proses-proses yang terjadi di instansi, mengetahui koordinasi yang dibangun oleh BPBD Kota Malang dalam melaksanakan Tupoksinya, kita juga bisa membandingkan tentang teori yang kita peroleh di bangku kuliah, membandingkan dengan ekspetasi bagaimana kerja di dunia pemerintahan dengan realita yang ada. Sebagai Mahasiswa tentu masih minim dalam dunia kerja sehingga kita harus mampu dengan cepat beradaptasi, kendala yang ada dalam kegiatan Magang riset ini adalah waktu yang mungkin kurang tepat, sehingga tidak banyak pekerjaan yang membutuhkan bantuan.

Nama : Istayu Pratistaning Utami

NIM : 201410050311129

Kegiatan Magang Riset di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mulai dilakukan pada tanggal 5 September hingga 5 November 2017. Magang riset kelompok kami mengusung tema penelitian tentang EWS (*Early*

Warning System) yang lebih di fokuskan berbasis masyarakat dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM PERINGATAN DINI (*EARLY WARNING SYSTEM*)”**. Selama 2 bulan kegiatan magang riset di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sesuai dengan tujuan saya dan kelompok saya yaitu mendapatkan pelajaran dan pengalaman magang serta dapat menyelesaikan laporan penelitian yang kita angkat dari proposal yang telah kita ajukan sebelumnya.

Dalam proses magang selama 2 bulan kedepan saya berusaha untuk dapat menggali banyak informasi untuk menambah wawasan praktik dalam dunia kerja dan sekaligus menyumbangkan ilmu yang saya dapat selama dibangku kuliah dengan semaksimal mungkin. Terdapat banyak kegiatan magang riset yang saya dan teman – teman lakukan di kantor, yang mana kegiatan tersebut terdiri dari beberapa macam kegiatan yaitu berdasarkan perintah dari bidang yang saya tempati yaitu bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan), kesekretariatan, serta kegiatan wawancara yang mana untuk mendapatkan data dalam penyusunan laporan akhir magang riset.

Kegiatan yang berasal dari seluruh pihak BPBD seringkali melibatkan pihak instansi lainnya yaitu pertama, rapat dengan semua pihak BPBD dan lembaga surveyor terkait Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BPBD Kota Malang, kedua, sosialisasi dari inspektorat terkait analisis jabatan. Kegiatan yang berasal dari bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan) yang saya tempati sendiri yaitu pertama, lomba Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur yang dihadiri beberapa OPD se-Jawa Timur dan juga persiapan apel siaga yang membutuhkan persiapan panjang dan sangat matang. Dalam kedua kegiatan ini, saya dan dua orang teman saya diminta untuk menjaga daftar hadir peserta dan memberikan konsumsi. Ada juga kegiatan lainnya yaitu, input data jumlah peserta dan dokumentasi sebagai surat pertanggungjawaban kegiatan.

Kedua adalah Survey lapangan yakni pencatatan koordinat titik kumpul yang nantinya digunakan sebagai data kajian pembuatan peta jalur evakuasi. Setelah itu saya dan juga teman-teman lainnya yang berada dalam satu bidang PK diminta untuk mapping peta pada setiap Kelurahan Tangguh dan saya mendapat

bagian Kelurahan Kedungkandang yang terdiri dari peta wilayah dan peta rawan bencana. Kegiatan tersebut sedikit dapat diatasi karena telah mendapat bekal selama mata kuliah geographic Information System. Namun kegiatan ini terkendala laptop yang kurang memadai serta Aplikasi Geographic Information System tersebut mempunyai kapasitas yang cukup besar sehingga sulit diinstal ke dalam laptop dan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi peta Kelurahan Kedungkandang yang saya dapati sedikit lebih terkendala daripada yang lain karena batas-batas kelurahan tersebut sulit ditemukan untuk nantinya menemukan titik koordinat. Namun kesulitan tersebut bisa diatasi karena teman-teman lainnya membantu.

Kegiatan yang ketiga adalah Rapat kegiatan sapu bersih kali dengan relawan Kelurahan Tangguh Bandungrejosari, setelah itu mengikuti kegiatan sapu bersih kali di Kelurahan Bandungrejosari. Keempat adalah distribusi surat permohonan partisipasi masker terkait meletusnya Gunung Agung di Bali, kepada pimpinan perusahaan seperti mall-mall dan Dinas Kesehatan Kota Malang.

Keempat, yaitu menyiapkan dan mendistribusikan undangan rapat pembahasan laporan penyusunan kajian pengurangan resiko bencana (PRB) BPBD Kota Malang yang akan dihadiri oleh Kepala bidang, Kepala sub bagian yang ada di BPBD, serta perwakilan LPPM Universitas Brawijaya. Selanjutnya saya juga mengikuti rapat tersebut. Kelima yaitu Membuat proposal pengurangan resiko bencana Kota Malang yang dibagi bersama dengan teman-teman lainnya dikarenakan proposal yang sangat banyak namun harus selesai dalam sehari karena dibutuhkan sesegara mungkin oleh pihak bidang kantor.

Keenam, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yakni kegiatan pelatihan yang diadakan di tempat terbuka. Tempat yang dipilih adalah Lembah Dieng. Sebelumnya, saya dan teman-teman lainnya diminta untuk membantu Persiapannya berupa packaging seragam dan kelengkapannya, distribusi undangan, serta ikut dalam kegiatan rapat bersama relawan Kelurahan Tangguh untuk membahas pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tersebut sekaligus pengambilan seragam dan kelengkapannya. Dalam hal ini, terdapat kendala yakni kurangnya koordinasi dan kurangnya komunikasi sehingga pada saat pengambilan seragam sedikit mengalami kebingungan.

Kegiatan terakhir dalam magang riset saya dan teman-teman ialah apel siaga. Apel siaga juga sekaligus kegiatan besar yang diadakan oleh PK pada tanggal 22 November 2017. Persiapan sudah jauh-jauh hari dilakukan walaupun pada dasarnya acara tersebut masih lama. Dalam kegiatan ini saya diminta membuat daftar absensi kehadiran dan absensi untuk konsumsi para tamu. Kegiatan apel siaga rencana akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober mendatang. Kegiatan apel siaga ini akan dihadiri oleh beberapa OPD se-Kota Malang, komunitas atau organisasi di Kota Malang, serta para relawan dari Kelurahan Tangguh. Selain diberi tugas untuk membuat absen, saya juga diberi tugas membantu packaging dan distribusi kaos, serta distribusi undangan apel siaga. Dengan adanya kegiatan Magang Riset ini saya dan teman-teman sangat senang dan sekaligus bangga karena berkat magang riset ini banyak sekali pengalaman, ilmu, nasihat yang saya dapatkan untuk nantinya menjadi evaluasi bagi diri saya sendiri dan bisa saya kembangkan serta saya terapkan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Nama : Rendika Satria W.P

Nim : 201410050311121

Pada kegiatan magang riset atau belajar menjadi pekerja disebuah instansi, itu tidak lah muda karena dimana kita harus dapat menempatkan diri pada posisi porsi kapasitas kemampuan kita sendiri untuk dapat menjalankan tugas yang diberikan atau yang kita bantu dalam instansi BPBD Kota Malang tersebut. Dengan bekal kemampuan yang telah di pelajari dalam perkuliahan kita akan menerapkan etos kerja kita dalam instansi yang kita tempati untuk magang. Dalam magang riset banyak hal kegiatan dan kerjaan yang harus dapat diselesaikan dengan baik oleh

setiap mahasiswa, yaitu mulai kegiatan atau penugasan yang berada didalam kantor dan juga berada di luar area kantor.

Kegiatan yang berada di dalam kantor yaitu melingkupi seperti, pembantuan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh pihak kantor, semisal yang saya kerjakan dalam lingkup kantor yaitu seperti, mempersiapkan semua keperluan yang ada dikantor untuk melaksanakan kegiatan kekantor untuk mengikuti acara Kelurahan Tangguh yang diadakan dan didatangi langsung oleh BNPB pusat, disini yang bertanggung jawab akan melaksanakannya kegiatan lomba Kelurahan Tangguh yaitu dilimpahkannya kepada bidang PK (Pencegahan dan Kesiapsiagaan), disini seluruh mahasiswa magang riset dan juga saya di minta untuk membantu kegiatan tersebut dalam penyiapan akan berlangsung nya lomba kelurahan tangguh yang diadakan pada tanggal 7 September 2017 yang bertempat pada Kelurahan Sawojajar, dalam melaksanakan tugas yang diminta tolongi oleh pihak kantor BPBD Kota Malang, disini kami dimintai untuk menyiapkan semua artibut – artibut yang dibutuhkan untuk pelaksanaan lomba Kelurahan Tangguh dan juga alat – alat lainnya yang dibutuhkan. Kegiatan yang di dalam lingkup kantor lainnya yaitu seperti pengimputan data orang – orang yang masuk dalam kategori relawan bencana disetiap kelurahan tangguh untuk selanjutnya diberikannya kaos dari pihak BPBD yang bertujuan untuk dapat meningkatkannya rasa relawannya dan juga kepeduliannya terhadap adanya bencana alam di Kota Malang. Seiring berjalannya waktu kami sebagai mahasiswa magang riset, diminta tolong bantuan kami untuk pembuatan Mapping, yaitu dimana setiap mahasiswa dapat membuat peta – peta tiap kelurahan yang di daearnya mempunyai wilayah yang rawan bencana. Tidak hanya itu saja kita sebagai mahasiswa magang riset diminta bantuan dari pihak kantor saya sendiri juga biasanya diminta bantuan dari orang – orang kantor untuk membantu hal – hal yang ringan seperti contohnya yaitu disuruhnya foto copy atau me scan data – data yang diperlukan dan ditugaskan oleh orang – orang kantor. Seiring nya berjalan waktu saya dimintai bantuan untuk mengerjakan kegiatan – kegiatan kantor yaitu dibidang umum, yang dimana saya diminta bantuan untuk membantu para staf –staf kantor BPBD Kota Malang dalam melaksanakan kegiatan kerja Kantor BPBD Kota Malang, seperti conyohnya saya ditugaskan untuk

membantu input data pembelanjaan atau keperluan kantor untuk diinputkan dalam daftar pembelanjaan daerah yang dilakukan secara Online.

Tidak hanya didalam kantor kami mahasiswa magang riset juga dimintai tolong langsung untuk terjun lapang bersama pihak kantor BPBD untuk membantu kegiatan – kegiatan yang sudah di agendakan oleh Kantor BPBD Kota Malang. Seperti halnya, yaitu pada awal pembahasan tadi dimana kami diminta tolong terjun lapang langsung untuk pelaksanaan lomba Kelurahan Tangguh yang bertempat di Kelurahan Sawojajar. Disini saya dalam pelaksanaannya melaksanakan tugas membantu untuk menancapkan artibut tentang akses jalur evakuasi untuk masyarakat kelurahan tangguh yang berada di kelurahan sawojajar, tidak hanya itu pada berlangsungnya kegiatan lomba saya diminta untuk membantu dokumentasi semua akitivitas yang sedang berlangsung saat Kelurahan Tangguh. Selain ini kami juga diajak mengikuti kegiatan lainnya yang sudah ada di agenda yaitu seperti kegiatan pelatihan para relawan Kelurahan Tangguh yang ada di Kota Malang, yang dimana dilaksanakannya di daerah taman rekreasi lembah dieng. Dimana dalam kegiatan ini saya juga diminta bantuan dari pihak Kantor BPBD untuk mendokumentasikan semua kegiatan yang saat itu berlangsung. Tidak hanya kegiatan penting – penting saja kami sebagai mahasiswa magang riset juga sering diminta bantuan untuk menyebar undangan dalam rangka berbagai agenda kegiatan kantor maupaun tiap bidang – bidang yang ada di BPBD Kota Malang.

Dalam 2 bulan melaksanakan Magang Riset di Kantor BPBD Kota Malang, banyak hal dan ilmu yang kami serap, serta berbagai pengarahan dan masukan dari setiap omongan orang kantor terhadap saya untuk menuju kehidupan kedepannya dan juga banyak memberikan motivasi untuk kedepannya. Jadi dalam pelaksanaan magang riset ini saya mempunyai pengalaman – pengalaman baru dan juga keluarga baru beserta dengan orang – orang kantor BPBD Kota Malang.

NAMA : M.AGUM BIKHRANSYAH

NIM : 201410050311152

Hari pertama saya magang , saya dan teman teman menuju kantor BPBD malang bersama-sama dan itu tanpa di antar oleh dosen, lalu sesampainya kami di kantor BPBD malang kami langsung mengikuti apel pagi yang kebetulan saat pertama kali masuk kantor itu bertepatan pada hari selasa yang mana pada hari tersebut selalui di lakukan apel pagi lalu setelah mengikuti apel pagi itu kami di ajak untuk ikut ke kelurahan swojajar untuk menyiapkan kantor lurah tersebut untuk mengikuti lomba kelurahan tangguh,di sana kami menyiapkan ruangan memasang banner llau memasang tanda jalur evakuasi di sepanjang jalan sekitar kantor kelurahan sawojajar, tidak terasa kami bekerja sudah mendekati jam 16.00 maka kami menyudahi kegiatan pada hari pertama tersebut.

Lalu besok nya pada hari rabu kami masih melanjutkan pekerjaan di kantor kelurahan tersebut untuk mengikuti lomba kelurahan tangguh, lalu setelah agak siang saya dan para lelaki yang lain di tugaskan untuk mengantar surat ke beberapa kantor dan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di kota mlaang, saya dan rendika pun mulai mengelilingi kota malang untuk membagikan surat-surat tersebut, oh iya sebelum kami berangkat untuk megantar surat kami di berikan kupon bbm oleh mas arif.

Beberapa hari selanjutnya saya juga sering di ajak oleh mas arif untuk turun lapang seperti ke keluirahan kelurahan, kekantor pajak untuk membayar pajak kantor sehubungan dengan pajak catering makanan acara lomba kelurahan tangguh kemaren. Lalu saya dan teman-teman mempersiapkan ruangan untuk rapat dan sekaligus mengikuti rapat tersebut yaitu rapat survey IKM terhadap pelayanan publik BPBD kota Malang dan membuat absensi serta surat untuk apel siaga sekota malang dan juga di mintai bantuan untuk menginput data proposal pengurangan resiko bencana kota malang.

Kami juga sering bertanya tentang refrensi riset tentang EWS kepada bapak-bapak yang ada di kantor bpbd untuk dimintai keterangan, Saya juga sering di ajak turun lapang bersama mas arif untuk mengambil barang-barang yang di dapatkan bpbd seperti masker untuk di bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan masker tersebut di dapat dari RSSA. Dalam beberapa hari kedepan sering diadakan rapat bersama para inspektorat untuk melakukan analisa jabatan, dan beberapa rapat lainnya terkait dengan apel siaga sekota malang.

Kami juga di mintai tolong oleh bapak dian untuk membuat arc.gis terkait mapping di beberapa kelurahan kami juga terjun langsung ke Rt/Rw untuk menentukan titik koordinat agar lebih akurat dan kita juga dapat memperhitungkan dengan melihat langsung tempat tersebut. setelah di tinjau maka kami membagi kelompok untuk membuat map dan saya mendapat bagian membuat mapping peta kelurahan Bandungrejosari tetapi yang seharusnya pekerjaan tersebut bisa cepat selesai tetapi kami malah terlambat untuk menyelesaikannya di karenakan terkendala laptop, karena hanya beberapa laptop saja yang bisa di gunakan untuk menginstall aplikasi arc.map gis tersebut maka laptop pun di gunakan secara bergantian. lalu di tengah kesibukan membuat peta tersebut kami juga di sibukan dengan rapat sapu Bersih kali bersama beberapa relawan kelurahan tangguh yang mana mereka mengusulkan untuk meminta bantuan kepada pihak BPBD agar dapat mensupport kegiatan mereka ,Lalu pada hari minggu kami di ajak terjun langsung bersama masyarakat dan relawan tangguh untuk melihat dan berpartisipasi dalam membersihkan kali tersebut.

Kami juga di ajak ke acara peresmian jembatan Kaca di Jodipan yang acara tersebut di resmikan oleh abah anton,lalu keesokan hari nya kami mengikuti rapat terkait penyusunan kajian pengurangan bencana BPBD kota malang.

Lalu kami melakukan pendataan terkait pembagian kaos kepada kelurahan tangguh dan juga melakukan pendataan terkait pembagian kaos dan sepatu untuk kegiatan Apel siaga se kota Malang,lalu hari hari selanjutnya kami melakukan packing perlengkapan relawan (Topi,Kaos,celana,sabuk,celana,sepatu) untuk di bagikan kepada para relawan kelurahan tangguh se kota malang,lalu kami juga membikin surat untuk undangan kehormatan untuk acara apel Siaga sekota Malang.Lalu hari berikutnya kami di bagi beberapa kelompok untuk membagikan surat kepada kelurahan untuk mengikuti acara peningkatan serta kesiapsiagaan masyarakat dalam hal menghadapi bencana.

Beberapa dari kami di ajak untuk meninjau lokasi outbound yang akan di laksanakan kegiatan peningkatan serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap menghadapi bencana,setelah kami mendapatkan lokasi yang di rasa cocok untuk kegiatan tersebut maka kegiatan terlaksana dan kami pun di ajak semua ke sana, setelah acara beberapa minggu kemudian kami di minta tolong untuk mengikuti acara apel siaga yang mana acara tersebut sangat seru dan memberikan wawasan kepada masyarakat awam.Mungkin itulah gambaran kegiatan magang saya selama di BPBD kota Malang.

BAB III

ANALISA HASIL KEGIATAMN

PEMBAHASAN

A. Peringatan Dini Berbasis Masyarakat

Telah diketahui bahwa dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari bencana karena bencana datang secara tiba-tiba tanpa manusia dapat menghindarinya. Namun bencana dapat dicegah dan diminimalisir kerugiannya. Dalam menghadapi bencana, masyarakat harus siap dan siaga dalam mengadapi segala situasi darurat, sehingga partisipasi aktif dan kapasitas masyarakat mengambil peran yang penting di dalamnya. Sarana dan prasarana yang ada di

sekitar masyarakat harus dimanfaatkan dengan baik sebagai penunjang dari informasi dan komunikasi. Sejatinya, masyarakat pengetahuan dan kearifan lokal tentang gejala alam sebagai tanda-tanda akan terjadinya suatu bencana, sehingga harus direalisasikan melalui tindakan nyata yang membawa kebermanfaatan bagi peringatan dini bencana.

Dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, peringatan dini merupakan komponen yang sangat penting, khususnya dalam memberikan peringatan kepada masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan jenis peringatan yang diberikan.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya (ancaman) bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007 Pasal 1 ayat 8).

Sistem peringatan dini ini akan memberikan peringatan terkait bencana yang akan terjadi atau kejadian alam lainnya. Peringatan dini bencana merupakan suatu kegiatan memberikan informasi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dicerna, di mana dalam penyebarluasannya diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya. Peringatan dini tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat.

Telah diketahui bahwa dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari bencana karena bencana datang secara tiba-tiba tanpa manusia dapat menghindarinya. Namun bencana dapat dicegah dan diminimalisir kerugiannya. Dalam menghadapi bencana, masyarakat harus siap dan siaga dalam menghadapi segala situasi darurat, sehingga partisipasi aktif dan kapasitas masyarakat mengambil peran yang penting di dalamnya. Sarana dan prasarana yang ada di sekitar masyarakat harus dimanfaatkan dengan baik sebagai penunjang dari informasi dan komunikasi. Sejatinya, masyarakat pengetahuan dan kearifan lokal tentang gejala alam sebagai tanda-tanda akan terjadinya suatu bencana, sehingga harus direalisasikan melalui tindakan nyata yang membawa kebermanfaatan bagi peringatan dini bencana.

Oleh karena itu warga perlu memahami dan menyepakati tanda-tanda alam yang beralasan, selain peringatan dini resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan datangnya satu ancaman dalam waktu dekat. Warga dengan demikian segera dapat

bertindak untuk mengikuti prosedur penyelamatan diri, keluarga dan tetangganya, barang berharga, serta bila perlu mengatur penjagaan terhadap aset yang ditinggalkan saat mengungsi.

B. Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Peringatan Dini Yang dilakukan oleh BPBD Kota Malang melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Paradigma penanganan bencana telah banyak mengalami perubahan. Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja akan tetapi lebih kepada keseluruhan manajemen bencana. Seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup aspek yang lebih luas, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dengan demikian, maka paradigma penanggulangan bencana diharapkan agar dapat mewujudkan optimalisasi manajemen bencana di berbagai wilayah.

Dalam upaya peningkatan optimalisasi penanganan bencana di Kota Malang terutama untuk melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. “Peringatan Dini” merupakan faktor paling utama dalam Pengurangan Resiko Bencana, Peringatan Dini dapat mencegah banyaknya korban jiwa, dan meminimalkan dampak akibat bencana. Agar berjalan efektif, sistem peringatan dini harus melibatkan masyarakat secara aktif, memfasilitasi pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko yang dihadapi, menyebarluaskan pesan dan peringatan secara efektif, serta menjamin kesiapsiagaan yang selalu terjaga.

Salah satu upaya peringatan dini berbasis masyarakat yang dibentuk oleh BPBD Kota Malang melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah dibentuknya “Kelurahan Tangguh” dimana melalui Kelurahan Tangguh ini masyarakatnya mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk digunakan dalam rangka menanggulangi bencana yang ada di daerahnya. Hal tersebut seperti yang tercantum

dalam Perka BNPB No 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana, bahwa yang dimaksud Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Dalam membentuk Kelurahan tangguh, ada indikator yang harus diterapkan sesuai dengan tingkatannya. Kelurahan Tangguh memiliki 3 tingkatan, mulai urutan pertama adalah tingkat Pratama yang harus memenuhi 6 indikator, kemudian tingkat Madya memiliki 6 Indikator, dan kemudian yang terakhir adalah Tingkatan Utama yang harus memenuhi semua indikator, yaitu sebanyak 20 Indikator.

Selain pembentukan Kelurahan tangguh, upaya yang telah dilakukan BPBD melalui bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Pelatihan relawan, dimana relawan dari setiap kelurahan tangguh yang berjumlah 15 di setiap kelurahan diberikan pelatihan sekaligus sebagai bentuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam melatih relawan penanggulangan bencana. Karena masyarakat merupakan penerima dampak langsung dari bencana alam dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu masyarakat perlu dilatih agar menjadi tangguh dalam menghadapi bencana dan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana khususnya di Kota Malang, serta sebagai bentuk peringatan dini agar masyarakat mampu merespons dengan cepat ketika terjadi bencana, karena masyarakat yang tangguh ialah masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak melalui adaptasi.

C.Mekanisme Penerapan Early Warning System (EWS) Dalam Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Dalam penerapan sistem peringatan dini bencana (EWS), terdapat suatu mekanisme untuk mengetahui prosedur yang harus dilakukan dalam menerapkan sistem tersebut. Dalam prosesnya, mekanisme penerapan sistem peringatan dini bencana(EWS) dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Komando dari Atasan ke Bawahan (Top-Down) yaitu dengan cara melakukan Komando dari atasan ke bawahan yang terealisasikan melalui

pembagian job desk antar anggota, di mana ketua pelaksana adalah bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan.

2. Koordinasi Antar Organisasi, Komunitas, dan Perguruan Tinggi yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antar organisasi/komunitas untuk bekerja sama. Kerjasama tersebut berupa kegiatan simulasi bencana dengan relawan kelurahan tangguh. Dalam hal ini kegiatan tersebut menjadi pelatihan karena didesain dengan menghadirkan bencana buatan, di mana nantinya untuk melatih bagaimana kesiapan relawan dalam memberikan peringatan dini. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan STIKES Maharani Malang, AIPTINAKES, dan PMI. Kerjasama tersebut bersifat simbiosis mutualisme, di mana dapat meningkatkan pengetahuan relawan terhadap upaya menghadapi bencana, sehingga terlatih dalam menghadapi bencana, sedangkan bagi organisasi dan perguruan Tinggi yakni memberikan pelatihan dan praktek di lapangan setelah mendapatkan ilmu secara teori. Sejauh ini, Relawan tangguh sangat antusias dalam simulasi bencana tersebut, yang mana mereka selalu menghadiri dan meluangkan waktu dalam kegiatan tersebut.

3. Jika Relawan Tangguh telah terbentuk, maka harus tetap menjaga komunikasi dan mengadakan program-program agar partisipasi mereka selalu aktif. Seperti yang diketahui bahwa segala sesuatu tentang kebencanaan pasti melibatkan relawan tangguh. Dalam pelaksanaannya, relawan Kelurahan Tangguh tersebutlah yang nantinya mensosialisasikan kepada masyarakat pada kelurahan terkait tentang apa saja yang akan dilakukan dalam sistem peringatan dini bencana (EWS). Agar relawan tangguh tersebut dapat berjalan dengan baik dan berpartisipasi dengan aktif, BPBD Kota Malang mempunyai agenda untuk mengadakan pertemuan langsung dengan relawan tangguh, yang nantinya kendala dan kebutuhan mereka dapat tersampaikan melalui pertemuan tersebut. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara BPBD dan relawan Tangguh.

4. Pemasifan Informasi harus dilakukan dengan menjangkau semua masyarakat. Dalam hal ini, pemasifan informasi dilakukan dengan berbagai cara. Jika dilihat dari BPBD Kota Malang, BPBD Kota Malang melalui Tim Reaksi Cepat akan turun langsung ke lapangan ketika mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana, yang kemudian menginformasikan ke grup Whatsapp yang beranggotakan

Relawan Kelurahan Tangguh dan tim bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Malang, yang mana akan disebarluaskan ke masyarakat. Namun tidak selamanya BPBD sebagai informan pertama, relawan yang mengetahui pertanda tersebut pun juga harus menginformasikan ke grup whatsapp agar nantinya dikaji kekongkritan informasi tersebut.

3 Partisipasi Masyarakat Dalam Efektivitas Peringatan Dini Bencana

Berdasarkan peringatan alam dan informasi resmi lembaga pemberi peringatan dini bencana, maka masyarakat diharapkan mampu melakukan respon yang benar sesuai dengan arahan yang diberikan. Masyarakat diharapkan sudah memiliki rencana evakuasi untuk masing-masing individu dan keluarga. Pengarahan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan diri dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kelompok peringatan dini yakni salah satunya dari pihak relawan yang sudah dibentuk oleh Kelurahan. Relawan tentunya sudah diberikan pelatihan, ilmu dan pengetahuan yang mana hal tersebut untuk disampaikan lagi kepada masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk menghindari kepanikan yang mungkin muncul pada saat peringatan tersebut dikeluarkan ketika tanda-tanda bencana mulai dirasakan.

Relawan yang sudah dibentuk sesungguhnya merupakan jembatan antara BPBD dengan masyarakat, sebab banyak masyarakat yang kurang paham dan masih apatis terhadap lingkungan sekitar. Itu sebabnya dibentuklah relawan agar masyarakat paham dengan kondisi lingkungannya, namun yang diharapkan oleh BPBD tidak hanya paham secara teori saja akan tetapi masyarakat ikut turun tangan. Dari pernyataan diatas, sebelum turun tangan dalam keadaan bahaya, diharapkan juga masyarakat ikut bila ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh relawan dan BPBD. Karena sesungguhnya tanggung jawab dalam peringatan dini bencana merupakan tanggung jawab bersama yang mana BPBD hanya memberikan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang nantinya akan aplikasikan ketika bencana akan datang. Misalkan mengikuti arahan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggungjawab untuk memberikan peringatan dini bencana, berpartisipasi dalam kegiatan latihan peringatan dini di masyarakat, memberikan informasi yang

tepat terkait dengan potensi bencana yang terjadi, menjaga seluruh sumberdaya dan peralatan yang terpasang untuk mendukung sistem peringatan dini bencana, terlibat aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Masyarakat sudah sedikit banyak ikut beberapa kali dalam kegiatan membersihkan lingkungan dan latihan peringatan dini. Artinya beberapa masyarakat ada yang sudah mulai sadar dan paham tentang apa itu peringatan dini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga beberapa masyarakat yang masih belum peduli dan masih apatis. Hal tersebut yang masih menjadi PR bagi relawan dan BPBD, bagaimana caranya agar bisa merangkul semua masyarakat untuk menyadarkan akan pentingnya peringatan dini bencana. Karena partisipatif lebih efektif dan berdampak positif dalam menggerakkan masyarakat lokal apabila semua pihak ikut terlibat untuk pengembangan kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Jadi, semua tergerak untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan.

Untuk mencapai tujuan yang optimal, Partisipasi masyarakat tersebut harus selalu ditingkatkan. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara Pertama, Peningkatan kapasitas relawan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan pencegahan terhadap bencana yang diadakan oleh BPBD. Hal tersebut sangat penting karena nantinya relawan yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat pada kelurahan terkait. Selain itu, kegiatan dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman tentang kajian resiko bencana, bahkan kajian tentang pembuatan peta rawan bencana. Hal tersebut dapat dibantu oleh BPBD Kota Malang bilamana relawan mengalami kesulitan. Kedua, Adanya ikut campur tangan atau perhatian dari pihak kelurahan terhadap relawan tangguh. Telah diketahui bahwa jika Kelurahan tangguh telah terbentuk, hal tersebut merupakan tanggungjawab kelurahan untuk mengembangkannya. Ketiga, Pengadaan sosialisasi yang selalu menyinggung tentang peringatan dini bencana(EWS) di setiap acara – acara kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyelipkan sosialisasi ke dalam acara tahlil, pengajian, kerja bakti, PKK, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kurang menyukai kegiatan yang terlalu resmi dan dikhususkan untuk sosialisasi saja karena seringkali mereka menghabiskan waktu

dari pagi hingga soer untuk bekerja sehingga harus dapat menyiasatinya dengan menyelipkannya melalui kegiatan yang sering mereka lakukan di luar jam kerja.

4 ANALISIS EFEKTIFITAS 4 UNSUR PENTING PERINGATAN DINI

Analisis terhadap proses pembangunan ketangguhan masyarakat terhadap bencana melalui Peringatan Dini Bencana menunjukkan bahwa semua unsur peringatan Dini Telah dipenuhi oleh masyarakat Kota Malang dan Otoritas terkait, dalam hal ini adalah BPBD Kota Malang . 4 unsur tersebut adalah (1) pengetahuan tentang risiko, (2) pemantauan dan pelayanan peringatan, (3)penyebarluasan dan komunikasi, (4) kemampuan merespon masyarakat. Dari keempat unsur yang disebutkan, jika semua telah terlaksana dengan baik , maka sistem peringatan dini akan bisa dikatakan Efektif. Hasil telaah 4 unsur peringatan dini yang dilaksanakan BPBD Kota Malang sebagai berikut :

4.1.1 Pengetahuan Resiko Bencana

Relawan dan masyarakat perlu untuk mengetahui pengetahuan resiko bencana agar dapat mengambil langkah ketika terjadi bencana. Pengetahuan resiko bencana tersebut dapat dirumuskan yakni mengetahui tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana agar dapat segera bertindak menyelamatkan diri, mengetahui dampak atau akibat terjadinya bencana agar meningkatkan kesadaran untuk mencegah atau bersiap diri menghadapi bencana tersebut, dan seberapa besar potensi bencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya preventif.

Resiko akan muncul dari adanya bahaya dan kerentanan di suatu lokasi. Kajian terhadap resiko bencana memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis serta harus terencana dan mempertimbangkan bahaya maupun kerentanan yang muncul dari berbagai proses seperti urbanisasi, perubahan pemanfaatan lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan perubahan iklim. Dengan adanya peta resiko bencana akan membantu masyarakat sehingga masyarakat akan memprioritaskan pada kebutuhan sistem peringatan dini dan persiapan untuk mencegah dan menanggulangi bencana.

Namun pada kenyataannya resiko tentang bahaya dan kerentanan akan bencana masih belum terlalu dikenal baik oleh masyarakat yang mana belum disediakan fasilitas peta rawan bencana. Peta rawan bencana merupakan unsur penting untuk mengetahui resiko mana saja yang memiliki kemungkinan besar

terjadi bencana. Sehingga masyarakat akan tau dan akan lebih waspada serta mengantisipasi resiko bencana di daerahnya. Informasi yang cukup pada masyarakat mampu mengurangi kerentanan yang ada, sehingga resiko bencana dapat ditekan dengan pengetahuan yang cukup pada masyarakat.

Hubungan tentang pengetahuan resiko bencana dengan sikap tentang kesiapsiagaan bencana pada masyarakat masih kurang baik. Pengetahuan akan kebencanaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, berbagai informasi mengenai jenis bencana yang mungkin mengancam mereka, perkiraan daerah jangkauan bencana, gejala-gejala bencana, prosedur penyelamatan diri, dan informasi lain akan sangat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana yang datang serta dapat mengurangi jumlah korban. Peran serta pemerintah dalam ini selaku BPBD Kota Malang, LSM, NGO, PERS, dan Elemen-elemen masyarakat lainnya diharapkan mampu mensosialisasikan informasi mengenai kebencanaan sehingga pengetahuan masyarakat tentang bencana akan meningkat. Penyampaian informasi yang benar serta pelurusan pengetahuan dan persepsi masyarakat yang keliru mengenai bencana akan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana.

Dalam kenyataannya, masyarakat sedikit banyak telah memiliki pengetahuan tentang resiko bencana di daerahnya. Namun, sebagian masyarakat masih memiliki sikap apatis. Contohnya, masih seringnya buang sampah sembarangan padahal mereka tau bahwa hal tersebut akan menimbulkan banjir. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat apabila ada kegiatan kerja bakti, padahal kerja bakti salah satu usaha untuk mengurangi terjadinya bencana.

Untuk meningkatkan keefektifitasan sebuah peringatan dini salah satunya unsur pengetahuan resiko bencana. Untuk itu BPBD Kota Malang sebaiknya lebih meningkatkan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang resiko bencana yang lebih tinggi dan lebih sadar dengan kondisi lingkungan sekitar. Dari hasil analisa pengetahuan masyarakat tentang resiko bencana masih belum bisa dikatakan efektif. Sebab kesadaran masyarakat yang masih kurang dan juga belum mengerti tentang resiko bencana, juga sebaliknya dari pihak BPBD yang masih belum maksimal memonitoring masyarakat sekitar tentang pengetahuan yang dimiliki. Sehingga

kesimpulannya antara pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta kurang kerjasama dengan baik.

4.1.2 Pemantauan dan Layanan Peringatan

Yang berwenang dalam Peringatan dan layanan peringatan tersebut haruslah dari pihak yang dapat dipercaya karena jika tidak, maka keakuratan berita akan dipertanyakan. Pemantauan harus dilakukan serutin mungkin untuk mengetahui perkembangan tingkat ancaman, agar jika ancaman semakin buruk akan dapat segera ditindaklanjuti. Dalam prosesnya, jika terdapat kejadian bencana yang diketahui oleh relawan, maka relawan harus melaporkan kejadian tersebut kepada badan penanggulangan daerah kota malang agar segera ditindaklanjuti oleh badan penanggulangan bencana daerah. Salah satu tindakan penanggulangan bencana daerah apabila sudah mendapat informasi dari masyarakat maka akan dilakukan tim kaji cepat tujuannya untuk mendeteksi, memantau pada wilayah yang teridentifikasi akan terjadinya bencana baik itu bencana banjir, tanah longsor maupun bencana alam lainnya. Apabila tim kaji cepat telah mengidentifikasi bahwa benar telah terjadi bencana. Maka dari badan penanggulangan bencana daerah Kota Malang akan menurunkan tim reaksi cepat (TRC) untuk segera menindaklanjuti kejadian yang telah diinformasikan oleh tim kaji cepat. Dalam hal ini diperlukan adanya koordinasi antar elemen kemasyarakatan, koordinasi antar lembaga Badan penanggulangan bencana, komando dari atasan ke bawahan baik ditingkat lembaga maupun tingkat elemen kemasyarakatan guna memperlancar dalam melaksanakan proses pemantauan dan layanan peringatan bencana. Jika masyarakat belum ada yang mengetahui bencana, maka BPBD Kota Malang yang turun ke lapangan untuk memantau kondisi terkini, namun masyarakat tidak boleh lengah dan mengandalkan BPBD saja, keduanya harus sama-sama berperan agar pemantauan yang dilakukan dapat menjadi peringatan yang segera ditindaklanjuti.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada aza/prinsip-prinsip utama yaitu Kemanusiaan, Keadilan, Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, keseimbangan, keselarasan, keserasian, ketertiban, dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus

didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut : cepat dan tepat, prioritas, koordinasi, dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminasi, dan non-proselitisi.

1. Cepat dan Tepat

Cepat dan tepat adalah suatu prinsip yang diterapkan dalam penanggulangan bencana untuk dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan keadaan.

2. Prioritas

Prioritas adalah suatu prinsip yang diterapkan dalam upaya penanggulangan bencana harus mengutamakan kelompok rentan.

3. Koordinasi dan Keterpaduan

Koordinasi adalah suatu prinsip yang digunakan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan adalah suatu prinsip yang digunakan sebagai upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh berbagai sector secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

4. Berdayaguna dan Berhasilguna

Berdayaguna dan Berhasilguna adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengatasi dalam kesulitan masyarakat yang dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah suatu prinsip yang digunakan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas adalah suatu prinsip yang digunakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

6. Kemitraan

Kemitraan adalah suatu prinsip dalam penanggulangan bencana yang harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

7. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu prinsip yang digunakan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif. Keberadaan atau peran korban dalam pemberdayaan ini hendaknya tidak dipandang sebagai obyek semata.

8. Non Diskriminatif

Non Diskriminatif adalah suatu prinsip yang digunakan penanggulangan bencana yang tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan/atau aliran politik apapun.

9. Non Proselitisi

Non Proselitisi adalah suatu prinsip yang digunakan penanggulangan bencana bahwa dalam penanganan pelaksanaan penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

Indikator pemantauan dan layanan peringatan dapat dikatakan efektif karena BPBD Kota Malang karena dilakukan oleh kedua belah pihak yakni BPBD dan masyarakat. Dari BPBD sendiri telah terdapat tim yang memantau lapangan dan mengkajinya, sedangkan masyarakat pun juga berwenang menginformasikan ke BPBD terkait apa yang telah ditemukan di lapangan jika saat itu BPBD belum memberikan informasi.

4.1.3 Penyebarluasan dan Komunikasi

Penyebarluasan dan komunikasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi dan memasifkannya kepada masyarakat. Komunikasi yang ada tersebut harus menjangkau ke semua orang tanpa terkecuali karena perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh dan merata agar mereka pun mengetahui apa yang harus dilakukan ke depannya. Bukan hanya itu, pesan yang akan disampaikan pun harus jelas dan mudah dipahami oleh semua kalangan agar tidak menimbulkan unsur ambigu dan dapat diterima dengan baik oleh penerima. Hal tersebut sangat penting karena berhubungan dengan jiwa dan kehidupan seseorang. Pihak pemberi informasi pun harus diberikan kepada pihak yang bertanggungjawab dan berkompeten agar penyebarluasan dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

Alat-alat komunikasi komunikasi tersebut harus terdiri dari beberapa jenis dan jumlah karena untuk menghindari kegagalan salah satu peralatan sehingga dapat ditanggulangi dengan pemakaian peralatan lain. Masyarakat pun harus bertanggungjawab menjaga dan merawat Alat-alat komunikasi tersebut agar selalu berfungsi, selain itu jenis alat komunikasi juga perlu mempertimbangkan kemudahan dalam pembuatan, pengoperasian dan perawatan yang dapat dilakukan oleh warga secara mandiri.

Penyebarluasan dan komunikasi dilakukan melalui Whatsapp, kentongan, dan sirine. Dalam pelaksanaannya, terdapat grup Whatsapp yang beranggotakan relawan Tangguh dan fasilitator dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mana mereka akan berkoordinasi jika terdapat suatu kegiatan atau bencana, yang nantinya dikomunikasikan melalui kentongan dan sirine agar masyarakat segera melakukan upaya penyelamatan. Alat penyebaran peringatan perlu ada di tempat-tempat berkumpulnya warga di kawasan berisiko, antara lain permukiman, sekolah, kantor, pasar, rumah sakit, dan lokasi wisata.

Indikator Penyebarluasan dan komunikasi dapat dikatakan efektif karena adanya whatsapp tersebut dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan jumlah kentongan dan sirine tersebut pun cukup memadai, sehingga jika terdapat bencana yang datang, peralatan tersebut dapat digunakan untuk menyebarluaskan kepada masyarakat setempat.

Dengan demikian diharapkan penyebarluasan dan komunikasi selalu berjalan dengan baik agar nantinya kebutuhan masyarakat akan informasi akurat pun dapat terpenuhi, sehingga bencana yang akan terjadi pun dapat diminimalisir.

4.1.4 Kemampuan Respon

Kemampuan respon adalah hal yang penting pula dalam sebuah sistem peringatan dini, dimana masyarakat harus cepat dan tanggap merespon sebuah peringatan dini bencana, serta mempunyai rencana evakuasi yang baik untuk menyelamatkan diri. Membangun kemampuan respon masyarakat telah dilakukan dengan memastikan rencana respon selalu diperbaharui, kecakapan dan pengetahuan lokal dapat dimanfaatkan, serta masyarakat sudah siap merespon peringatan. Dalam hal ini, BPBD Kota Malang sering kali melaksanakan pelatihan-

pelatihan pada Relawan Kelurahan Tangguh, dan juga simulasi-simulasi kebencanaan. peningkatan kapasitas dan kemampuan melalui Relawan ini sebagai jembatan antara BPBD dengan masyarakat, dimana diharapkan Relawan yang sudah terlatih ini mampu mengkoordinir masyarakat ketika saat terjadi bencana agar masyarakat lebih cepat merespon situasi dan peringatan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait yang memang berhak mengeluarkan peringatan.

Kerjasama antar lembaga, komunitas NGO dan para stakeholder yang dilakukan BPBD Kota Malang adalah salah satu bentuk koordinasi yang sangat baik untuk meningkatkan pemahaman dan cara merespon masyarakat agar lebih cepat dan tanggap. Sebagian besar masyarakat yang tersebar di seluruh kota Malang yang terbagi diberbagai kelurahan, masih banyak yang belum mengetahui dampak yang akan diakibatkan oleh bencana sehingga pada saat bencana datang masyarakat merasa kebingungan dalam menghadapi bencana tersebut. Ada juga sebagian masyarakat yang sudah mengetahui teknis dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan telah melakukan pembinaan dan pelatihan kesiapan dalam menghadapi bencana. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang mengetahuinya tetapi enggan untuk memberikan pembinaan/pembelajaran terhadap masyarakat yang belum mengetahui tentang kebencanaan.

Indikator kemampuan respon belum dikatakan efektif karena masyarakat belum mempunyai prosedur evakuasi yang terencana karena seringkali kebingungan dalam bertindak sehingga BPBD yang seringkali berperan ketika terjadi bencana

5 Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem peringatan dini bencana (Faktor penghambat dan pendukung)

Dalam upaya pencapaian tujuan dalam suatu birokrasi, pasti terdapat kekurangan di dalamnya. Hal itu yang nantinya dijadikan pembelajaran dan evaluasi ke depannya agar lebih baik lagi. Dalam perjalanannya, terdapat factor penghambat yang mempengaruhi efektivitas sistem peringatan dini bencana di Kota Malang. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Maksudnya adalah masyarakat belum mengetahui harus melakukan tindakan apa ketika terjadi bencana. Sejauh ini, masyarakat bertindak dalam tahap menanggulangi bencana. Walaupun bencana

adalah sesuatu yang datang secara tidak terduga dan sulit untuk dicegah, namun terdapat cara untuk mencegah agar dampak bencana tersebut dapat diminimalisir.

Resiko bencana terbesar di Kota Malang adalah bencana banjir. Namun beberapa sungai dapat dikatakan tercemar karena digunakan untuk tempat pembuangan sungai. Selain itu, debit air pun meningkat ketika hujan tiba yang mengakibatkan air sungai naik ke atas.

Kedua adalah kurangnya sosialisasi. Sejauh ini, sosialisasi yang telah dilakukan tidak dianggap sebagai suatu hal yang penting karena mayoritas apa yang mereka dapatkan dalam sosialisasi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga saat bencana terjadi mereka tidak tau apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sehingga memakan banyak korban dan kerugian fisik. Saat ini, lebih banyak masyarakat yang berperilaku seperti masyarakat metropolitan sehingga masyarakat sekarang berperilaku acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar

Faktor ketiga adalah masyarakat belum mengetahui prosedur evakuasi. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri karena jika pengetahuan tersebut tidak diketahui, maka masyarakat akan bingung dan panic sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang dikhawatirkan adalah masyarakat yang salah mengambil jalur evakuasi, semakin mendekat ke sumber bahaya, dan terpisah dari keluarga.

Keempat, sebagian besarmbelum adanya Standar Operasional Prosedur tentang sistem peringatan dini bencana di beberapa kelurahan. Hanya Kelurahan Sawojajar yang mempunyainya. Telah diketahui bahwa untuk pencapaian tujuan, dibutuhkan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. SOP tersebut sangat penting untuk memahami alur atau metode kerja yang harus dijalankan, memahami tingkat kesulitan dan kerumitan suatu pekerjaan, dan melihat fungsi dan pembagian tugas antar anggota yang terlibat. SOP dapat digunakan sebagai pegangan dan arahan bagi masyarakat dan stakeholders dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana karena dapat member penjelasan bagaimana mekanisme suatu kegiatan dilakukan dan siapa yang akan melakukannya.

Kelima, kurangnya pemahaman tupoksi pemerintahan desa dan relawan kelurahan tangguh. Dalam sistem peringatan dini yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, representasi dari sistem tersebut adalah program kelurahan tangguh. Namun hal tersebut terkendala

dalam pemahaman tupoksi. Dalam hal ini, pemerintahan desa dan relawan kelurahan menganggap bahwa BPBD yang mempunyai tupoksi dalam pelaksanaan program-program kelurahan tangguh bencana sehingga hanya menunggu program-program dari pemerintah. Sejatinya, BPBD hanyalah instansi yang membentuk kelurahan tangguh tersebut, di mana dalam pelaksanaannya akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan desa. Dalam hal ini, bukan berarti BPBD langsung melimpahkan wewenang kepada pemerintahan desa, namun Tugas pokok dan fungsi BPBD adalah sebagai fasilitator dalam kelurahan Tangguh, di mana jika terdapat program yang membutuhkan keahlian khusus dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan desa dan relawan, maka BPBD akan turun langsung untuk memfasilitasinya.

Selain itu, masyarakat menganggap bahwa relawan kelurahan tangguh lah yang akan mengurus kebencanaan sehingga mereka menyerahkannya kepada relawan. Padahal relawan sama halnya dengan masyarakat, di mana mereka yang koordinasi dengan pemerintahan desa dan BPBD, sedangkan partisipasi aktif harusnya menyeluruh oleh semua masyarakat.

Tupoksi yang seharusnya diterapkan tersebut merupakan langkah pemberdayaan karena jika BPBD yang mengurus kelurahan tangguh tersebut, maka masyarakat tidak dapat menjadi masyarakat yang mandiri. Masyarakat harus partisipatif untuk mengurangi kebergantungan masyarakat kepada pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan asas demokrasi bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan.

Keenam, belum ada papan jalur evakuasi, dan titik kumpul. Telah diketahui bahwa bencana akan datang pada kehidupan manusia secara tiba-tiba sehingga manusia harus siap untuk menghadapinya. Agar tidak memakan korban jiwa, maka harus ada upaya bahwa harus ada langkah untuk mencegahnya. Papan Jalur evakuasi dan titik kumpul memegang peranan yang sangat penting karena untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menghindari bencana tersebut. Kendala yang sering muncul adalah masyarakat yang tidak mengetahui prosedur evakuasi dengan baik, sehingga kepanikannya justru menjadikan mereka mengambil jalur yang salah atau bahkan mendekat ke sumber bahaya dan terpisah dengan keluarga. Jalur evakuasi tersebut nantinya dapat merancang jalur mana yang cepat dan tidak macet untuk dilewati ketika bencana datang. Selain pemasangan papan jalur evakuasi,

harus terdapat sosialisasi kepada masyarakat karena dikhawatirkan masyarakat kurang memahami apa maksud dari papan jalur evakuasi dan titik kumpul tersebut.

Selain faktor penghambat dalam penerapan sistem peringatan dini bencana, pasti terdapat faktor pendukung yang memicu keberhasilan program tersebut. Hal tersebut yang harus tetap dipertahankan agar sistem yang telah terbentuk dapat terlaksana dengan baik dan mapan. Dalam hal ini, faktor pendukung sistem peringatan bencana kota Malang adalah pertama, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Hal tersebut terbukti dengan adanya peralatan yang digunakan untuk peringatan dini bencana antara lain kentongan dan sirine. Untuk memperkuat peralatan tersebut, tindakan yang dilakukan pun juga telah teralisasi melalui kegiatan lomba kentongan se Kota Malang. Hal tersebut dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk menggunakan peralatan dengan baik dan benar.

Kedua, inisiatif relawan. Walaupun masyarakat pada umumnya mempunyai tingkat kesadaran yang cukup rendah, namun relawan yang telah tergabung tersebut ada yang mempunyai keaktifan untuk berperan serta dalam peringatan dini bencana. Walaupun jumlahnya tergolong sedikit, mereka mempunyai usaha yang cukup baik untuk manajemen komunitas relawan bencana pada kelurahan tersebut. Salah satunya yakni relawan akan mengkaji pembuatan peta rawan bencana.

Ketiga, komunikasi yang baik antar relawan lintas kelurahan. Dalam hal ini, relawan mempunyai semangat yang tinggi dalam meningkatkan komunikasi dengan komunitas lain se Kota Malang. Salah satunya adalah komunitas es teh anget. Dalam hal ini, terdapat beberapa anggota dari berbagai kelurahan yang tergabung di dalamnya. Dengan demikian dapat dilakukan sharing pengalaman dan pengetahuan satu sama lain, di mana perbaikan-perbaikan akan dilkakukan secara bertahap dan dapat memberikan motivasi satu sama lain dalam penerapan sistem peringatan dini bencana tersebut. Interaksi dalam komunitas tersebut dapat direalisasikan melalui berbagai ide yang nantinya ditujukan untuk pengembangan sistem peringatan dini bencana melalui relawan dari masing-masing kelurahan yang tergabung di dalamnya.

Keempat, koordinasi yang baik antara BPBD Kota Malang dan relawan Tangguh. Hal tersebut sangat baik karena sejatinya pemerintah harus melayani dan

memperhatikan masyarakatnya. Hubungan yang tercipta antara keduanya dalam mensinergikan suatu program agar tercapai dengan baik. Dalam hal ini, secara tidak langsung BPBD Kota Malang sebagai pelayan public akan mudah menganalisis kebutuhan dan kendala masyarakat. Bahkan, keduanya seringkali bertem dalam suatu kegiatan kebencanaan.

D. TARGET ATAU FOKUS YANG DICAPAI

Magang riset adalah mata kuliah yang ditempuh mahasiswa untuk mendalami ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah. Seperti yang diketahui bahwa ilmu tersebut bukan hanya teori sehingga perlu dipraktekkan di lapangan untuk mengetahui sejauh mana ilmu tersebut dapat terserap di dunia kerja. Dalam hal ini, penulis telah mencapai beberapa target selama magang riset tersebut. Pertama, penulis dapat menambah pengalaman dalam dunia kerja di mana hal tersebut tidak didapatkan di bangku kuliah, misalnya bagaimana cara berkoordinasi dengan rekan kerja, bagaimana cara bekerja dengan tim, serta meningkatkan kemampuan dalam hal administrasi karena seringkali tugas tersebut berhubungan dengan Microsoft office.

Kedua, menambah relasi dengan orang-orang yang duduk di instansi pemerintahan. Seperti yang diketahui bahwa mahasiswa pemerintahan memerlukan relasi dengan birokrat karena nantinya dapat menambah wawasan dengan membahas isu-isu pemerintahan serta sebagai relasi untuk menghubungkan ke dunia kerja. Dalam hal ini diperlukan komunikasi yang baik antara mahasiswa magang dan pihak instansi. Selama dua bulan tersebut, penulis dapat berkomunikasi dengan baik dengan pihak instansi, utamanya adalah bidang yang ditempati pada saat magang. Dalam hal ini, kami disatukan dalam agenda yang sama sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar ide demi kelancaran agenda tersebut.

Dengan demikian, mereka akan dapat menilai kinerja kami melalui pekerjaan yang kami selesaikan.

Ketiga, memahami praktek pemberdayaan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, telah diketahui bahwa agenda dari BPBD Kota Malang khususnya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan adalah bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, pelatihan kepada masyarakat, dll. Dalam hal ini, kami seringkali bertemu dengan masyarakat sehingga mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, bagaimana meningkatkan partisipasi mereka, bahkan mengikuti beberapa kegiatan bersama masyarakat seperti sapu bersih kali, atau diskusi relawan tangguh.

Keempat, melatih mapping peta. Dalam hal ini, kami telah mendapatkan dasar-dasar mapping peta pada mata kuliah geographic information system sehingga lebih mendalami lagi tahap tahap yang belum sempat dipelajari pada mata kuliah tersebut. Dengan demikian ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dapat diimplementasikan dalam magang riset tersebut.

Kelima, mendapatkan data penelitian. Seperti yang diketahui bahwa magang riset bukan hanya magang yang mengarah ke latihan kerja saja, namun terdapat riset yang nantinya sebagai wujud konkrit dari pengaplikasian kegiatan magang tersebut. Hal tersebut dapat didapatkan ketika mengikuti beberapa program dari instansi yang nantinya program tersebut juga menghasilkan data yang kami teliti. Selain itu, data juga diperoleh dengan melakukan wawancara kepada kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sehingga setelah semua data terkumpul dapat diolah dan direduksi sampai akhirnya disusun menjadi sebuah laporan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan peringatan alam dan informasi resmi lembaga pemberi peringatan dini bencana, maka masyarakat diharapkan mampu melakukan respon yang benar sesuai dengan arahan yang diberikan. Masyarakat diharapkan sudah memiliki rencana evakuasi untuk masing-masing individu dan keluarga. Pengarahan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan diri dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kelompok peringatan dini yakni salah satunya dari pihak relawan yang sudah dibentuk oleh Kelurahan. Relawan tentunya sudah diberikan pelatihan, ilmu dan pengetahuan yang mana hal tersebut untuk disampaikan lagi kepada masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk menghindari kepanikan yang mungkin muncul pada saat peringatan tersebut dikeluarkan ketika tanda-tanda bencana mulai dirasakan.

Relawan yang sudah dibentuk sesungguhnya merupakan jembatan antara BPBD dengan masyarakat, sebab banyak masyarakat yang kurang paham dan masih apatis terhadap lingkungan sekitar. Itu sebabnya dibentuklah relawan agar masyarakat paham dengan kondisi lingkungannya, namun yang diharapkan oleh BPBD tidak hanya paham secara teori saja akan tetapi masyarakat ikut turun tangan. Dari pernyataan diatas, sebelum turun tangan dalam keadaan bahaya, diharapkan juga masyarakat ikut bila ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh relawan dan

BPBD. Karena sesungguhnya tanggung jawab dalam peringatan dini bencana merupakan tanggung jawab bersama yang mana BPBD hanya memberikan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang nantinya akan aplikasikan ketika bencana akan datang. Misalkan mengikuti arahan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang bertanggungjawab untuk memberikan peringatan dini bencana, berpartisipasi dalam kegiatan latihan peringatan dini di masyarakat, memberikan informasi yang tepat terkait dengan potensi bencana yang terjadi, menjaga seluruh sumberdaya dan peralatan yang terpasang untuk mendukung sistem peringatan dini bencana, terlibat aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Beberapa Masyarakat sudah sedikit banyak ikut beberapa kali dalam kegiatan membersihkan lingkungan dan latihan peringatan dini. Artinya beberapa masyarakat ada yang sudah mulai sadar dan paham tentang apa itu peringatan dini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga beberapa masyarakat yang masih belum peduli dan masih apatis. Hal tersebut yang masih menjadi PR bagi relawan dan BPBD, bagaimana caranya agar bisa merangkul semua masyarakat untuk menyadarkan akan pentingnya peringatan dini bencana. Karena partisipatif lebih efektif dan berdampak positif dalam menggerakkan masyarakat lokal apabila semua pihak ikut terlibat untuk pengembangan kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Jadi, semua tergerak untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan.

Untuk mencapai tujuan yang optimal, Partisipasi masyarakat tersebut harus selalu ditingkatkan. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara Pertama, Peningkatan kapasitas relawan kelurahan tangguh. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan pencegahan terhadap bencana yang diadakan oleh BPBD. Hal tersebut sangat penting karena nantinya relawan yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat pada kelurahan terkait. Selain itu, kegiatan dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman tentang kajian resiko bencana, bahkan kajian tentang pembuatan peta rawan bencana. Hal tersebut dapat dibantu oleh BPBD Kota Malang bilamana relawan mengalami kesulitan. Kedua, Adanya ikut campur tangan atau perhatian dari pihak kelurahan terhadap relawan tangguh. Telah diketahui bahwa jika Kelurahan tangguh telah terbentuk, hal tersebut

merupakan tanggungjawab kelurahan untuk mengembangkannya. Ketiga, Pengadaan sosialisasi yang selalu menyinggung tentang peringatan dini bencana(EWS) di setiap acara – acarakemasyarakatan.Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyelipkan sosialisasi ke dalam acara tahlil, pengajian, kerja bakti, PKK, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kurang menyukai kegiatan yang terlalu resmi dan dikhususkan untuk sosialisasi saja karena seringkali mereka menghabiskan waktu dari pagi hingga soer untuk bekerja sehingga harus dapat menyiasatinya dengan menyelipkannya melalui kegiatan yang sering mereka lakukan di luar jam kerja.

B. SARAN

Sebuah bencana tidak dapat diperkirakan dengan pasti kapan terjadi, sebab itu sebuah peringatan Dini Bencana sangat mutlak diperlukan dalam Kesiapsiagaan bencana, semakin dini peringatan disampaikan kepada masyarakat, maka semakin longgar pula waktu masyarakat untuk meresponnya, sehingga mampu meminimalkan korban. Untuk itu sebaiknya sebuah sistem peringatan Dini Bencana harus selalu ditingkatkan, baik berbasis Teknologi dan juga berbasis masyarakat, karna perkembangan IPTEK yang begitu cepat, maka haruslah selalu mengembangkan Peringatan Dini dalam bidang teknologi melalui pengembangan alat,sistem komunikasi yang terintegrasi untuk memudahkan bagaimana menghadapi bencana, selain itu juga diharapkan pemerintah dalam hal ini adalah BPBD Kota Malang mampu memberikan penguatan SDM-nya yang mampu ikut serta dalam pengembangan teknologi, dimana selama ini dalam segi teknologi Peringatan Dini di Kota Malang dirasa masih kurang dan perlu adanya evaluasi serta peningkatan.

Selain dalam segi Teknologi, Peringatan Dini berbasis masyarakat juga tetap perlu ditingkatkan dengan sistem pemberdayaan masyarakat, karna masyarakat sendiri lah sumber dari informasi dan komunikasi. Walaupun sesungguhnya masyarakat telah memiliki pengetahuan dan kearifan Lokal tentang gejala alam serta tanda-tanda bencana,pengetahuan akan gejala alam tersebut sangat diperlukan karena merupakan bentuk peringatan dini bagi masyarakat untuk

dapat melakukan tindakan penyelamatan diri, dengan cara sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih tau tentang adanya BPBD, tentang informasi darimana yang harus masyarakat percaya, tentang bagaimana upaya ketika terjadi bencana, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Karna syarat utama agar peringatan dini ini dapat berhasil dengan efektif, diperlukan komitmen pribadi dan aksi nyata dari setiap anggota masyarakat maupun institusi dan komunikasi yang baik antar stakeholder yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT

Rineka Cipta.

Margono, 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta

Nasirah Bahaudin, 2006, *Tanggap Darurat Bencana (Safe Community)*, Jakarta :

Departemen Kesehatan RI.

Rachmadhi Purwana, 2013, *Manajemen Kedaruratan Kesehatan Lingkungan*

dalam Kejadian Bencana, Jakarta : Rajawali Pers.

Ratri M. Septina dan Diana Angelica, 2012, *Ancaman Alami, Bencana Tidak*

Alami : Ekonomi untuk Pencegahan yang Efektif, Jakarta : Salemba

Empat.

Simatupang, Robinson, dkk, 1989, *Bencana Alam dan Masalahnya*, Jakarta :

Yayasan Lembaga Bencana Alam Indonesia.

www.Bnpb.go.id

Buku Panduan Fasilitator Desa Tangguh

Nurjanah dkk,2011, Manajemen Bencana, Yogyakarta: Alfabeta

DOKUMENTASI AKTIVITAS MAGANG RISET



Doc: Saberkal Kel. Bandungrejosari



Doc: wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Doc: Pertemuan dengan Lurah dan Koordinator Kelurahan Tangguh



Wawancara dengan Relawan tangguh Kel. Bandungrejosari



Pelatihan Outdoor Relawan Tangguh